



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan sasaran strategis RPJMD 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Bupati Tabalong.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Tabalong;

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2015

✓ **BUPATI TABALONG,**
ttd

✓ **H. ANANG SYAKHFANI**

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 98



LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM REVIU	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVIU	RUMUS / FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam pemerintahan dan kemasyarakatan (saran: reviu)	Penurunan jumlah konflik bermuansa SARA Jumlah sarana prasarana sosial dan keagamaan yang mendapat bantuan	Prosentase Penanganan konflik bermuansa sara	$\frac{\text{Penyelesaian kasus}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya budaya kerja yang berkualitas dan produktif	Persentase penyelesaian kasus hukuman disiplin Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : a. BPK Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : b. BPKP, Itjen, Provinsi, APIP lainnya Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, oleh : c. Reguler Kabupaten Persentase pencapaian prolegda	Jumlah penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah penghargaan yang diterima setiap tahun WTP Persentase tindak lanjut	Seluruh SKPD BPKKD/Inspektorat Inspektorat
3..	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial serta peran masyarakat dalam menurunkan penyakit	Persentase Penegakan PERDA	Prosentase penurunan penyakit masyarakat (pekat)	$\frac{\text{Penyelesaian kasus pekat tahun } n}{\text{Jumlah kasus pada tahun } n} \times 100\%$	Satpol PP / Linmas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM REVIU	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVIU	RUMUS / FORMULASI	SUMBER DATA
	masyarakat (PEKAT)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMIK)			
4.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Indeks Pembangunan Manusia	IPM = $\frac{1}{3} [X(1) + X(2) + X(3)]$, dimana X(1) : indeks harapan hidup; X(2) Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah); X(3) = Indeks standar hidup layak	BPS
5.	Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein Penguatan Cadangan Pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan	Prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian dibagi jumlah PDRB di kali 100%	Dinas Hutan Pertanian
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah Penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%	BPS
7.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik Persentase Jembatan Kabupaten Dengan Kondisi	Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik Persentase Jembatan Kabupaten Dengan Kondisi Baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan kabupaten keseluruhan dikali 100 % Jumlah jembatan kondisi baik dibagi jumlah jembatan keseluruhan dikali	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM REVIU	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVIU	RUMUS / FORMULASI	SUMBER DATA
		Baik		100%	
		Persentase Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi dibagi luas area pertanian	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni dibagi luas kawasan permukiman	Dinas PU / Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
		Persentase ketersediaan sarana angkutan darat			BP2PAKB
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Prosentase perempuan yang duduk di pemerintahan	Jumlah perempuan yang duduk dipemerintahan dibagi jumlah penduduk perempuan keseluruhan dikali 100%	BP2PAKB
9.	Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup	Persentase luas pemukiman yang tertata	Indeks Kualitas Lingkungan		Dinas Takober dan PP
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 30 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (h.t)			
		Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di daerah yang belum terjangkau PLN			
		Persentase Penegakan hukum lingkungan			
10.	Meningkatnya potensi pemuda, olahraga, pariwisata dan seni budaya	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusanantara	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Nusanantara	Jumlah wisatawan yang berkunjung	Dina Porabudpar
		Jumlah prestasi olah raga dalam berbagai kejuaraan	Jumlah prestasi olah raga dalam berbagai kejuaraan	Jumlah perolehan juara pada kejuaraan yang diikuti	Dinas Porabudpar
		Terbentuknya tempat tujuan wisata			
11.	Meningkatnya kualitas dan produksi industry kecil, menengah, dan koperasi	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase peningkatan UMKM menjadi Usaha Besar	Jumlah UMKM yang menjadi Perusahaan Kecil/Menengah/Besar	Dinas Perindagkop & UKM
		Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dengan tepat waktu	Dinas Perindagkop & UKM
12.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah	Meningkat/menurun	Dinas Pendapatan Daerah
13.	Meningkatnya ketahanan pangan yang mantap	Produksi Padi Meningkatkan (ton)	Produksi Padi Meningkatkan	Jumlah hasil produksi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan produksi perkebunan			
		Produksi perikanan (ton)			
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Prosentase peningkatan Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat kepuasan pelayanan (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat dibagi Jumlah SKPD/Unit dikali 100%	Bagian Organisasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM REVIU	INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH REVIU	RUMUS / FORMULASI	SUMBER DATA
		Predikat SAKIP Kabupaten Meningkatnya minat baca masyarakat Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Pelaksanaan apel kesadaran nasional bagi PNS/ASN Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Website milik pemerintah daerah Peningkatan klasifikasi RSUD H.Badaruddin			
15	Meningkatkan pelaksanaan capaian program pembangunan dengan rencana pembangunan daerah	Persentase capaian pelaksanaan program pembangunan dengan SKPD Persentase kesesuaian pembangunan daerah dengan ketentuan aturan tata ruang Meningkatkan kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan daerah dengan ketentuan aturan tata ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah permohonan dikali 100%	Bappeda
16.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pertumbuhan daerah	Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan (terbentuknya BUMDes) Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa (Jumlah desa mandiri)	Persentase meningkatnya peran BUMDes Persentase jumlah desa mandiri	Jumlah BUMDes dibagi jumlah desa dikali 100% Jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%	BPM dan Pemdes BPM dan Pemdes

BUPATI TABALONG,

ttt

H. ANANG SYAKHFIANI